

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, S. (2007). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2013). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmadja, I. D. (1996). Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum Sisi Pelaksaaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen.
- Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta
- Didik Supriyanto, 2014, Very Junaidi, Devi Darmawan, Penguatan Bawaslu; Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi Pemilu 2014, Perludem, Jakarta
- Fatmawati. (2009). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral . Universitas Indonesia.
- Fauzin, S., DKK. (2016). Dialektika Hukum dan Etika Pemilukada Serentak. Jakarta: DKPP RI.
- Gautama, S. (1973). Pengertian tentang Negara Hukum. Yogyakarta: Liberty.

- H.S, S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Z. (n.d.). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, R. (2010). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Indroharto. (2002). Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Isra, S. (2013). Penggeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Lotulung, P. E. (1994). Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (2 ed.). Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, h. 146, dikutip oleh Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI
- Mariani, Y. T. (2008). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1993). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Prasetyo, T. (2015). Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum (Pertama ed.). Bandung: Nusa Media.
- Raharjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ramlan (2016). Reformulasi Sistem Penegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: DKPP RI.

- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (n.d.). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Rozali, A. (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Lgislatif)*. Jakarta: Rajawali Press.
- S.F. Marbun, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap sikap tindak Administrasi Negara*, Bandung: Penerbit Alumni
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soehino. (2008) *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-32*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sutiyoso, B. (2015). *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan (Keempat ed.)*. Jakarta: UII Press.
- Syahrial, D. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka-Yustisia.
- Tauda, G. A. (2012). *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Aencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dala Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kampus Pusat dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjandra, W. R. (1996). *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tjandra, W. R. (2010). *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Triwulan, T., & Sudrajat, A. S. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Utrecht, E. (1959). *Pengetian dalam Hukum Indonesia*. Cet. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.

Utrecht, E. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran.

Wahyono, P. (2003). *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill.

Winarno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.1-2

Wiyono, R. (2009). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makalah:

1. Hadjon, P. M. (n.d.). *Tentang Wewenang*, Makalah. Surabaya: Universitas Airlangga
2. Jimly Asshiddiqie, (2013) *Pengenalan Tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, Makalah, disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta

Jurnal

1. Asiyah, N. (2016, Januari-Juni). Eksistensi Perlingungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum*, 11 No. 1.
2. Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal MMH* 43 (1).
3. Chakim, M. L. (2014). Desain Konstitusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 11 No. 2.
4. Eki Furqon, Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nurani Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020
5. Hartono, N. M. (n.d.). Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara. *Jurnal Negara Hukum*.
6. M.Said, H. (2021). Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
7. Prayono, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
8. Risnain, M. (2014, Maret). Eksistensi Lembaga Quasi-Judicial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 No.1.

9. Riza, D. (n.d.). Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatera Law, Jurnal Hukum*, Vol. 2.
10. R. Tony Prayogo, 2016 Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PmK2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, No 2
11. Wantu, F. M. (2007). Antinomo Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*.
12. Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepanitiaan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum* .

#### Website

- Fakultas Hukum Brawijaya. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara. Retrieved Noivember 09, 2021, from <https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-Usaha-Negara.pdf>.  
<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/11/menyimak-kembali-checks-and-balances.html>, diakses pada 13 Desember 2021
- Fakultas Hukum Brawijaya. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara. Retrieved Noivember 09, 2021, from <https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-Usaha-Negara.pdf>.  
<http://digilib.uns.ac.id/Analisis-Kedudukan-Hukum-Lembaga-Negara-Penunjang-abstrak.pdf>, diakses pada 14 Desember 2021
- Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (n.d.). Retrieved November 09, 2021, from Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: <http://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/768-makna-pejabat-tata-usaha-negara-dalam-sengketa-tun-studi-tentang-putusan-ma-ri-tahun-2005-2011>
- Kurnia, A. J. (n.d.). Ciri-Ciri Sengketa Tata Usaha Negara. Retrieved 13 November 2021, from Hukum Online.

#### Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020
9. Putusan Mahkamah Konsitisi 81/PUU-IX/2011
10. Putusan Mahkamah Konsitisi Nomor 005/PUU-I/2003

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013
13. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
14. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 361 K/TUN/2015
15. Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019

